

# PENDAHULUAN

## A. Umum

---

Isu reformasi yang diwacanakan oleh para elit politik adalah *Good Governance*. Konsep *Good Governance* secara bertahap menjadi semboyan yang populer di kalangan pemerintahan, swasta, dan masyarakat pada umumnya. Sehingga jadilah ide *Good Governance* menjadi suatu harapan dan konsep yang diusung oleh semua lapisan masyarakat umum di republik ini. Paradigma penyelenggaraan pemerintahan harus berorientasi kepada aspek akuntabilitas, transparansi dan partisipatif yang relevan dengan clean government.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan salah satu aspek yang dapat mendukung prinsip-prinsip di dalam good governance tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. TIK juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat luas dalam kerangka mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge society) ke depan.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara diwajibkan untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta

kewenangan pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan program melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dengan berpedoman pada PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dalam mewujudkan pelaksanaan pemerintah yang *clean government* sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan di atas, menuangkan akuntabilitas hasil pelaksanaan kebijakan dan program Tahun Anggaran 2017 dalam bentuk Laporan Kinerja yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Maksud dari penyusunan LKj Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2017 adalah sebagai monitoring dan evaluasi dari sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RENSTRA 2014 – 2019 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, Khususnya Perjanjian Kinerja tahun 2017. Tujuannya adalah sebagai *feedback* untuk memperbaiki kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau pada tahun berikutnya.

## **B. Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau**

---

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau merupakan organisasi perangkat daerah yang disertai wewenang tugas dan tanggung jawab untuk menunjang penyelenggaraan urusan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas-tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informasi. Urusan Komunikasi dan Informatika adalah urusan wajib yang dilaksanakan Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota.

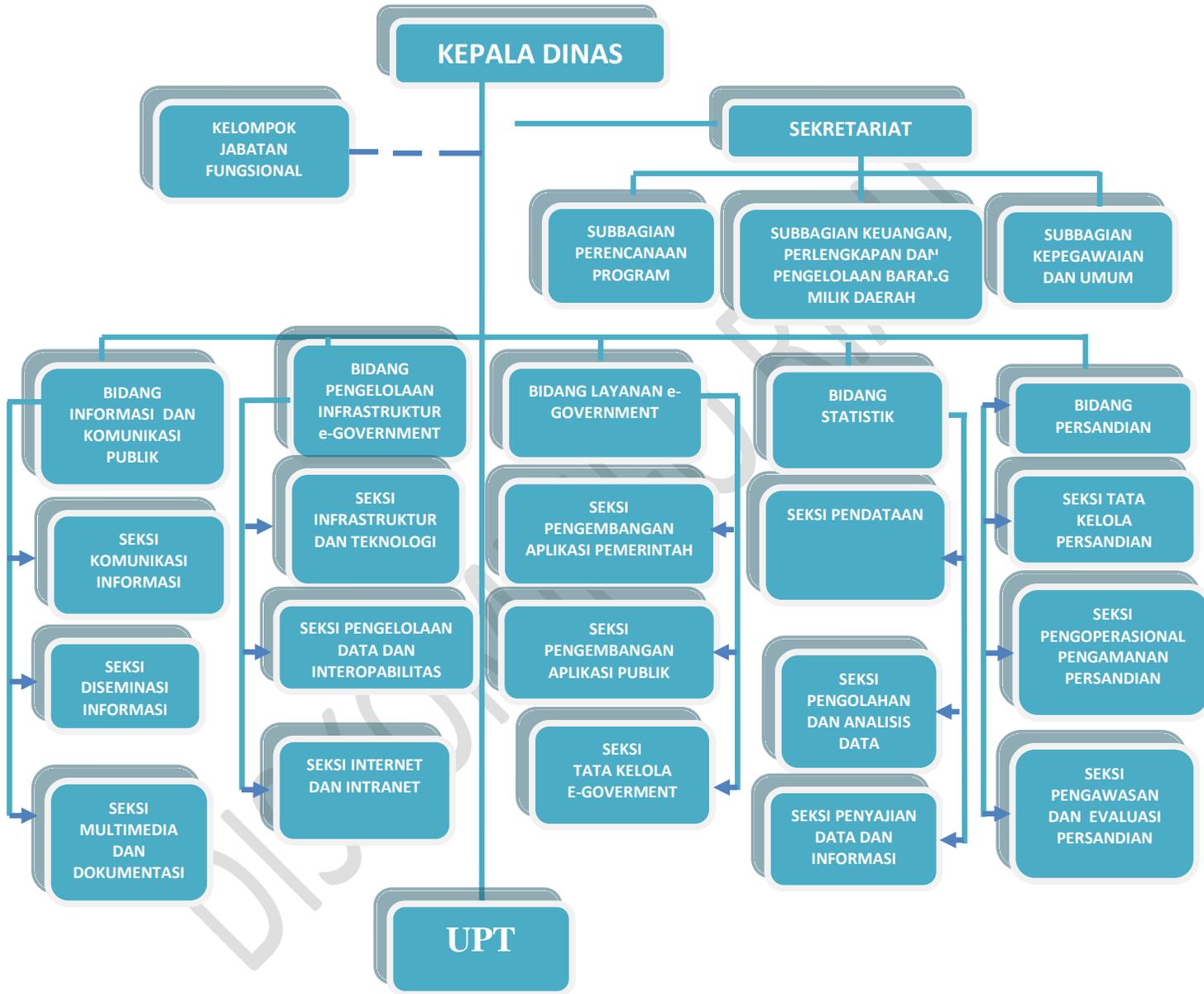
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau. Sedangkan untuk Unit Pelaksana teknis pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

## Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi

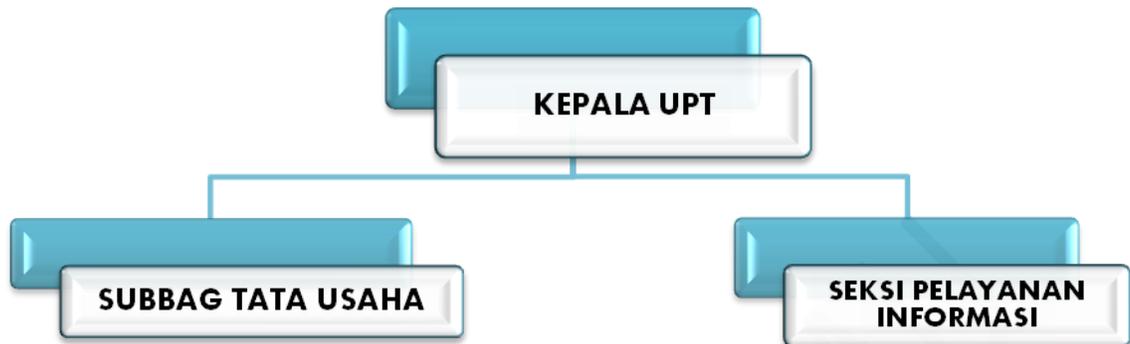
Riau terdiri atas :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
- d. Bidang Pengelolaan Infrastruktur e-Government
- e. Bidang Layanan e-Government
- f. Bidang Statistik
- g. Bidang Persandian
- h. Unit Pelaksana Teknis Media Center
- i. Unit Pelaksana Teknis Komisi Informasi Provinsi Riau

**BAGAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI  
RIAU SESUAI PERDA NO. 4 TAHUN 2016**



## UPT MEDIA CENTER



## UPT KOMISI INFORMASI PROVINSI RIAU



## BAB II

# RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

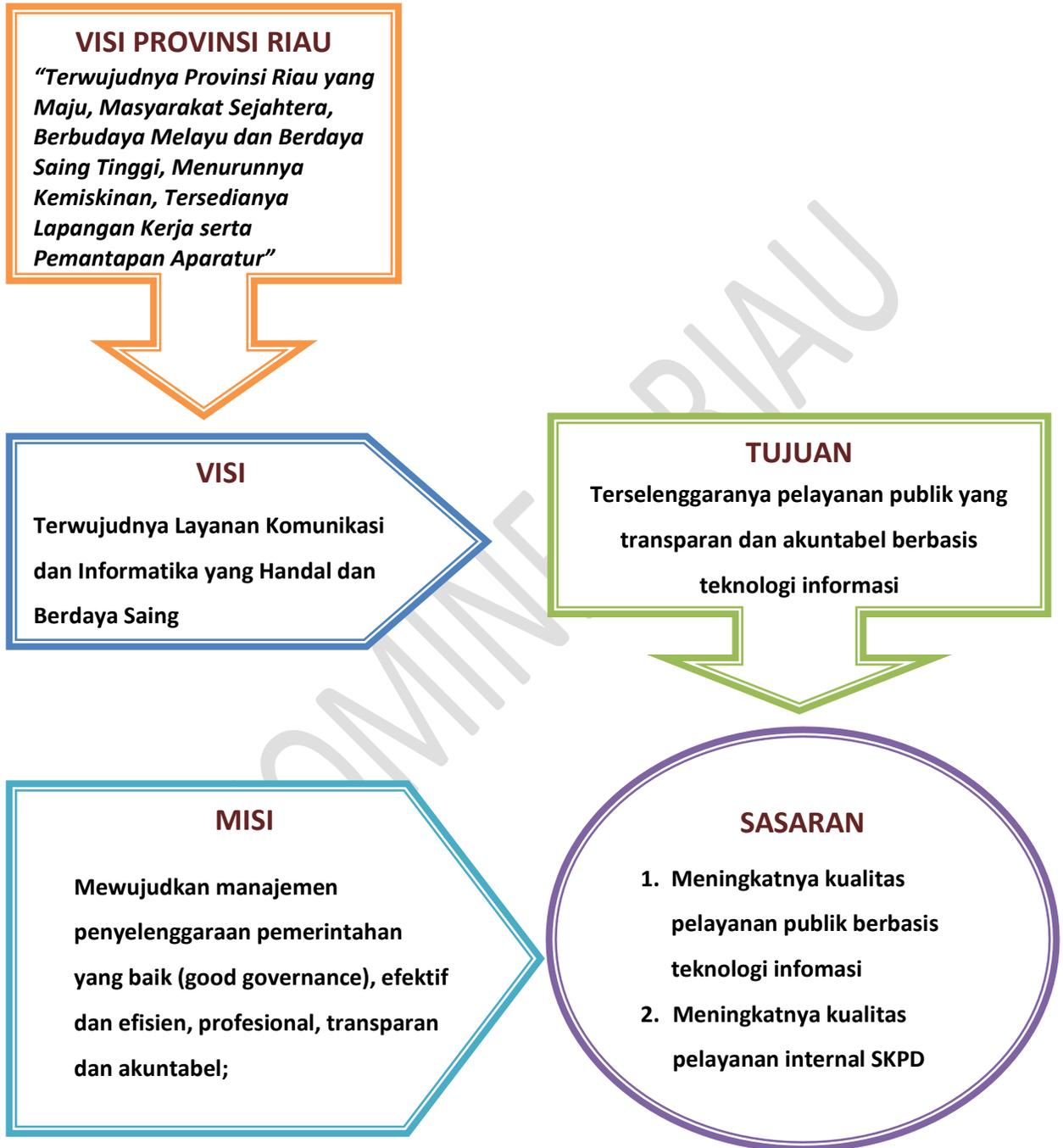
## A. RENCANA STRATEGIS

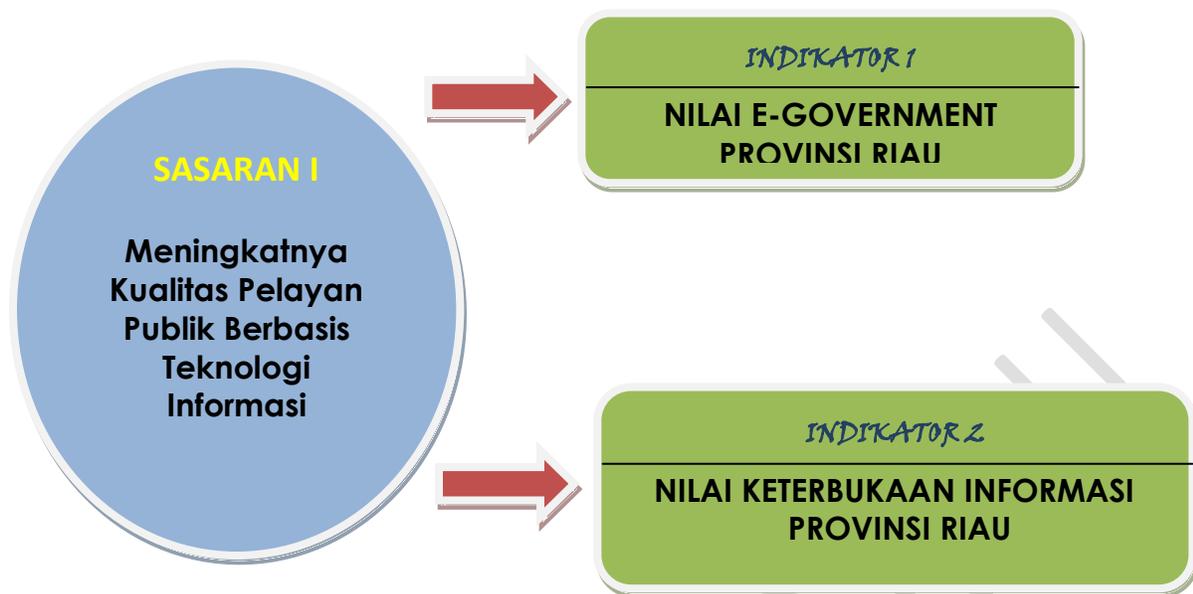
---

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2014-2019 merupakan pedoman/landasan serta arah pembangunan bidang komunikasi dan informatika di Provinsi Riau selama lima tahun ke depan. Dalam pelaksanaannya, Rencana Strategis Dinas Kominfo Provinsi Riau 2014 – 2019 telah mengalami revisi sejalan dengan tuntutan perubahan internal maupun eksternal. Demikian juga dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan adanya Rencana Strategis 2014 – 2019 diperoleh rencana tindakan dan kegiatan yang terpadu, sinkron dan bersinergi dalam melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang akan dibuat.

## VISI DAN MISI DINAS KOMINFO PROVINSI RIAU 2014 – 2019





Untuk mengukur keberhasilan sasaran I, diperlukan alat ukur / indikator untuk mengukur sejauh mana sasaran tersebut tercapai, indikator 1 sasaran I adalah : **Nilai e-Government Provinsi Riau** yaitu nilai yang diperoleh berdasarkan pemeringkatan e-government yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada Lembaga Pemerintah yang telah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara terintegrasi dalam memberikan layanan publik. Kategori yang dinilai adalah aspek Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi dan Perencanaan TIK.

## Nilai e-Government Provinsi Riau



- Jumlah jaringan komunikasi dan informatika yang terpasang
- Jumlah SKPD yang menerapkan e-Government secara terintegrasi, aman dan handal

### 5 Dimensi Penilaian E-Government :

1. Kebijakan
2. Kelembagaan
3. Infrastruktur
4. Aplikasi
5. Perencanaan

## ***Dimensi Pemeringkatan e-Government Indonesia :***

### **a) Kebijakan**

Dimensi kebijakan sangat erat kaitannya dengan produk hukum dan juga dokumen resmi yang memberi arah dan mendorong pemanfaatan TIK, terdiri dari:

- Manajemen/proses kebijakan (terkait TIK) yang dilaksanakan.
- Visi dan misi yang dijabarkan dengan jelas dan terdokumentasi dalam bentuk surat keputusan, peraturan, regulasi, kebijakan, pedoman, rencana strategis, atau bentuk dokumen resmi lainnya.
- Strategi penerapan kebijakan TIK yang dituangkan dalam bentuk rencana kerja, program, atau bentuk dokumen resmi lainnya.
- Standar atau panduan yang berkaitan dengan pemanfaatan TIK secara umum maupun secara spesifik dalam bidang-bidang tertentu.
- Peraturan terkait dengan pemanfaatan TIK untuk menjamin kelangsungan program pengembangan dan pemanfaatan TIK.
- Keputusan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait penerapan kebijakan TIK.
- Skala Prioritas penerapan TIK yang dilaksanakan.
- Evaluasi/manajemen resiko TIK yang diterapkan.

## **b) Kelembagaan**

Dimensi kelembagaan terkait erat dengan keberadaan organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengembangan dan pemanfaatan TIK dengan indikator:

- Keberadaan organisasi struktural yang lengkap sehingga dapat menjalankan fungsi *Chief Information Officer (CIO)*, dukungan teknis, dan fungsi lain dengan baik.
- Adanya dokumen yang memberikan rumusan yang jelas mengenai Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI).
- Adanya Sistem dan Prosedur Kerja yang lengkap dan terdokumentasi untuk melaksanakan hal-hal yang terkait dengan pemanfaatan dan pengembangan TIK.
- Adanya kelengkapan unit dan aparatur untuk mendukung pemanfaatan dan pengembangan TIK yang memadai dari segi jumlah, kompetensi, jenjang karir, maupun status kepegawaian.
- Adanya program pengembangan Sumber Daya Manusia TIK yang terencana dan terlaksana.

## **c) Infrastruktur**

Dimensi infrastruktur berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan TIK yang terdiri dari:

- *Data center* dan aplikasi pendukungnya.
- Jaringan Data (LAN, WAN, Internet).
- Keamanan yang terencana dan terevaluasi.

- Fasilitas pendukung seperti antara lain *AC*, *UPS*, *Genset*, serta sarana pengamanan fasilitas lainnya.
- Dokumen *Disaster Recovery* yang diperlukan jika terjadi kegagalan sistem.
- Pemeliharaan infrastruktur TIK.
- Inventarisasi peralatan TIK.

#### **d) Aplikasi**

Dimensi aplikasi berkaitan dengan ketersediaan dan dimanfaatkannya piranti lunak aplikasi yang memenuhi kriteria antara lain:

- Adanya situs web (*homepage*).
- Adanya Aplikasi fungsional utama 1 (Pelayanan Publik).
- Adanya Aplikasi fungsional utama 2 (Administrasi & Manajemen Umum).
- Adanya Aplikasi fungsional utama 3 (Administrasi Legislasi).
- Adanya Aplikasi fungsional utama 4 (Manajemen Pembangunan).
- Adanya Aplikasi fungsional utama 5 (Manajemen Keuangan).
- Adanya Aplikasi fungsional utama 6 (Manajemen Kepegawaian).
- Dokumentasi setiap aplikasi yang dimiliki.
- Inventarisasi seluruh aplikasi TIK.
- Interoperabilitas setiap aplikasi yang diterapkan.

Aplikasi tersebut haruslah mendukung fungsi dasar umum sistem pemerintahan yang terdiri dari antara lain:

- Pelayanan publik, seperti kependudukan, perpajakan dan retribusi, pendaftaran dan perijinan, bisnis dan investasi, pengaduan masyarakat, publikasi informasi umum dan pemerintahan, dan lain-lain.
- Administrasi dan manajemen umum yang meliputi surat elektronik, sistem dokumen elektronik, sistem pendukung keputusan, kolaborasi dan koordinasi, manajemen pelaporan pemerintahan, dan lain-lain.
- Administrasi legislasi yang meliputi aplikasi sistem katalog hukum, peraturan perundangan, dan lain-lain.
- Manajemen pembangunan yang meliputi sistem perencanaan pembangunan daerah, sistem pengadaan barang dan jasa, pengelolaan dan monitoring proyek, sistem evaluasi dan informasi hasil pembangunan, sistem laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- Manajemen keuangan, meliputi aplikasi anggaran, kas dan perbendaharaan, akuntansi daerah, dan lain-lain.
- Manajemen kepegawaian yang meliputi aplikasi penerimaan pegawai, absensi, penggajian, penilaian kinerja, pendidikan dan latihan, dan lain-lain.

### e) Perencanaan

Dimensi perencanaan berkaitan dengan proses perencanaan dengan indikator antara lain:

- Adanya organisasi yang melakukan perencanaan TIK
- Adanya sistem perencanaan untuk pengembangan dan pemanfaatan TIK yang dilakukan secara nyata
- Adanya dokumentasi *Master Plan* yang lengkap, yang mengandung unsur lima dimensi PeGI, Implementasi dari *Master Plan* yang sudah dibuat
- Adanya anggaran yang tertuang dalam RPJMN/RPJMD dan RKP/RKPD.

Indikator ke 2 sasaran I adalah : **Nilai Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Riau** yaitu nilai yang diperoleh berdasarkan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik terhadap ketaatan implementasi seluruh kewajiban Badan Publik dan memberikan akses informasi publik kepada masyarakat seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) dengan metode penyebaran Kuesioner Penilaian Mandiri (Self Assessment Questionnaire) ke seluruh Badan Publik.

## Nilai Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Riau

Sub indikator

- Persentase keterisian data pembangunan Provinsi Riau pada SDDKD
- Jumlah pengunjung website resmi dan media online yang dikelola Dinas Kominfo Provinsi Riau
- Jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan internet yang dikelola Dinas Kominfo Provinsi Riau

### Tahapan Penilaian:

- Pengisian Kuesioner Penilaian Mandiri (Self Assessment Questionnaire)
- Verifikasi Situs/Portal dan Sofffile Data Dukung
- Verifikasi Lanjutan Acak (VLA)
- Visitasi Badan Publik

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

---

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 merupakan tahun keempat Renstra Dinas Kominfotik Provinsi Riau 2014 – 2019. Perjanjian kinerja Dinas Kominfotik Provinsi Riau terlampir pada lampiran-4. Untuk mewujudkan kinerja Dinas Kominfotik Provinsi Riau Tahun 2017 didukung dengan anggaran Rp.47.103.947.653,- dengan rincian sebagai berikut :

No	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp.)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	37.644.936.624,-
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan internal OPD	5.876.541.300,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>43.521.477.924,-</b>



## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA DINAS KOMINFOTIK RIAU

---

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang merupakan hasil suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang telah ditetapkan. Disamping itu, sesuai dengan PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 dan PERMENPAN No.PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran, dan fungsi organisasi ditampilkan pada capaian Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja dan pencapaian sasaran, dimana setiap capaian indikator kinerja dijelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaannya.



Untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut, indikator kinerjanya yang pertama adalah *nilai e-government Provinsi Riau*.

Gambaran capaian sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi** adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai e-government Provinsi Riau	2.65	0	0%

Penilaian rutin dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI setiap tahunnya, namun pada **Tahun 2017 PEMERINGKATAN e-GOVERNMENT TIDAK DILAKSANAKAN OLEH KEMENTERIAN KOMINFO RI**, *karena pada tahun 2017 Kementerian Kominfo fokus pada Program pembangunan smart city dan pengembangan road map smart city/regency.*

Namun, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau sudah melakukan berbagai upaya dalam peningkatan nilai e-government Provinsi Riau. Berikut rangkuman upaya-upaya yang telah dilakukan dalam penilaian 5 dimensi e-government :

**1) Kebijakan**

- Membuat Perda tentang Sistem Pemerintahan berbasis teknologi informasi dan keterbukaan (Perda No. 6 tahun 2015)
- Membuat Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Pedoman pengelolaan aplikasi perkantoran secara elektronik (e-office) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

**2) Kelembagaan**

- Perekrutan Tenaga IT yang disebar di SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
- Adanya SOP tentang TIK, yaitu :
  - SOP surat masuk dan keluar secara elektronik (e-office)
  - SOP pembuatan SPT dan Surat Perintah Perjalanan Dinas secara elektronik (e-office)

- SOP pengajuan hak akses aplikasi
- SOP pelaksanaan pendampingan pembuatan aplikasi
- SOP Pengembangan Perangkat Lunak
- SOP Pengelolaan website (riau.go.id)
- SOP Pengembangan Teknologi Informasi Pemerintah Provinsi Riau
- SOP Pemeliharaan Jaringan Pemerintah Provinsi Riau

### 3) **Infrastuktur**

- Penyediaan bandwidth 500 mbps yang dialokasikan untuk OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
- Pembuatan command center Provinsi Riau
- Pembelian 200 unit PC yang didistribusikan untuk OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
- Melakukan interoperabilitas aplikasi menggunakan MANTRA.  
Proses penggunaan aplikasi MANTRA yang dikembangkan oleh Kemenkominfo yang akan diintegrasikan dengan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
- Pemasangan jaringan internet di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

### 4) **Aplikasi**

- Menyediakan Situs web (home page) dan saluran interaksi lainnya, melalui TV Streaming, Radio Streaming, Informasi Publish melalui Video Throne, serta

Media Center yang berlokasi di Perpustakaan Soeman HS dan Dinas Kominfotik Provinsi Riau

## 5) Perencanaan

- Membuat Master Plan TIK Provinsi Riau

Walaupun begitu, untuk mengukur kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi, berikut beberapa sub indikator sebagai alat ukurnya :

### SUB INDIKATOR NILAI E-GOVERNMENT

NO.	SUB INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	Jumlah jaringan komunikasi dan informatika yang terpasang	jaringan	51	60	117,6%
2.	Jumlah OPD yang menerapkan e-government secara terintegrasi, aman dan handal	OPD	35	46	131,4%

### Rincian Capaian Sub Indikator selengkapnya sebagai berikut :

#### 1) Jumlah jaringan komunikasi dan informatika yang terpasang

**Target : 51 jaringan**

**Realisasi : 60 jaringan**

Berikut daftar aktivasi Bandwith OPD Jaringan layanan komunikasi dan informatika yang dipasang oleh Dinas Kominfotik Provinsi Riau :

**DAFTAR AKTIVASI BANDWITH OPD DISKOMINFOTIK RIAU**

NO.	NAMA INSTANSI/BADAN/BIRO	AKTIFASI	BANDWITH	BERITA ACARA	KET
<b>BIRO</b>					
1	Sekretaris Daerah	SUDAH AKTIF	5	OK	
2	Biro Hubungan Masyarakat, Protokol dan Kerjasama	SUDAH AKTIF	10	OK	
3	Biro Administrasi Pembangunan Pengadaan Barang dan Jasa	SUDAH AKTIF	5	OK	
4	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	SUDAH AKTIF	5	OK	
5	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	SUDAH AKTIF	5	OK	
6	Biro Organisasi	SUDAH AKTIF	5	OK	
7	Biro Hukum	SUDAH AKTIF	5	OK	
8	Biro Umum	SUDAH AKTIF	5	OK	
9	Biro Kesra	SUDAH AKTIF	5	OK	
<b>DINAS</b>					
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	SUDAH AKTIF	80	OK	
11	Bidang Sandi dan Telekomunikasi (SANTEL)	SUDAH AKTIF	5	OK	
12	Dinas Pendidikan	SUDAH AKTIF	10	OK	
13	Dinas Ketahanan Pangan	SUDAH AKTIF	5	OK	
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	SUDAH AKTIF	10	OK	
15	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	SUDAH AKTIF	10	OK	
16	Dinas Perindustrian	SUDAH AKTIF	5	OK	
17	Dinas Kesehatan	SUDAH AKTIF	10	OK	
18	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Gd. A	SUDAH AKTIF	5	OK	
19	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Gd. B	SUDAH AKTIF	5	OK	
20	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Pengendalian Pendidikan dan Keluarga Berencana	SUDAH AKTIF	10	OK	
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	SUDAH AKTIF	10	OK	
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	SUDAH AKTIF	5	OK	
23	Dinas Kebudayaan (Museum Daerah)	SUDAH AKTIF	5	OK	
24	Dinas Pariwisata	SUDAH AKTIF	5	OK	
25	Dinas Sosial	SUDAH AKTIF	10	OK	
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Gedung Arsip)	SUDAH AKTIF	5	OK	
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Perpustakaan Wilayah)	SUDAH AKTIF	10	OK	
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	SUDAH AKTIF	5	OK	

NO.	NAMA INSTANSI/BADAN/BIRO	AKTIFASI	BANDWITH	BERITA ACARA	KET
29	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan	SUDAH AKTIF	10	OK	
30	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SUDAH AKTIF	10	OK	
31	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SUDAH AKTIF	10	OK	
32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SUDAH AKTIF	5	OK	
33	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	SUDAH AKTIF	10	OK	
34	Dinas PU dan PR	SUDAH AKTIF	5	OK	
35	Dinas Perhubungan	SUDAH AKTIF	5	OK	
36	Dinas Kelautan dan Perikanan	SUDAH AKTIF	5	OK	
BADAN					
37	Badan Ketahanan Pangan	SUDAH AKTIF	5	OK	
38	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	SUDAH AKTIF	10	OK	
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	SUDAH AKTIF	5	OK	
40	Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)	SUDAH AKTIF	5	OK	
41	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	SUDAH AKTIF	10	OK	
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)	SUDAH AKTIF	5	OK	
43	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	SUDAH AKTIF	10	OK	
44	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	SUDAH AKTIF	10	OK	
SKP LAINNYA					
45	Kantor Inspektorat	SUDAH AKTIF	10	OK	
46	RSUD Arifin Achmad	SUDAH AKTIF	10	OK	
47	RS Petala Bumi	SUDAH AKTIF	5	OK	
48	Sekretariat DPRD	SUDAH AKTIF	10	OK	
49	Kantor Satpol PP	SUDAH AKTIF	10	OK	
50	RSJ Tampan	SUDAH AKTIF	10	OK	
51	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)	SUDAH AKTIF	5	OK	
52	Komisi Informasi Provinsi Riau (KIP)	SUDAH AKTIF	5	OK	
LAINNYA					
53	Gedung Daerah/Kediaman Gubernur	SUDAH AKTIF	20	OK	
54	Gedung Dharma Wanita	SUDAH AKTIF	5	OK	
ASSISTEN					
55	Asisten I Bidang Pemerintahan dan Ekonomi Masyarakat	SUDAH AKTIF	5	OK	
56	Asisten II Bidang Perekonomian Dan Pembangunan	SUDAH AKTIF	5	OK	

NO.	NAMA INSTANSI/BADAN/BIRO	AKTIFASI	BANDWITH	BERITA ACARA	KET
57	Asisten III Bidang Administrasi Umum	SUDAH AKTIF	5	OK	
58	Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Infrastruktur	SUDAH AKTIF	5	OK	
59	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kemsyarakatan	SUDAH AKTIF	5	OK	
60	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan	SUDAH AKTIF	5	OK	
JUMLAH BANDWITH			505		

Daftar Jaringan layanan komunikasi dan informatika yang dipasang oleh Dinas Kominfo

Provinsi Riau :

NO.	NAMA OPD	JARINGAN		
		BANDWIDTHTH JUMLAH	RADIO/WIRE	FIBER OPTIC
1	Sekretaris Daerah	5	WIRE KOMINFO	-
2	Asisten I Bidang Pemerintahan dan Ekonomi Kemsyarakatan	5	WIRE KOMINFO	-
3	Asisten II Bidang Perekonomian Dan Pembangunan	5	WIRE KOMINFO	-
4	Asisten III Bidang Administrasi Umum	5	WIRE KOMINFO	-
5	Biro Administrasi Pembangunan Pengadaan Barang dan Jasa	5	WIRE KOMINFO	-
6	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	5	WIRE KOMINFO	-
7	Biro Hubungan Masyarakat, Protokol dan Kerjasama	10	WIRE KOMINFO	-
8	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	5	WIRE KOMINFO	-
9	Biro Kesra	5	WIRE KOMINFO	-
10	Biro Organisasi	5	WIRE KOMINFO	-
11	Biro Hukum	5		FIBER OPTIC -
12	Biro Umum	5	WIRE KOMINFO	-

13	Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Infrastruktur	5	WIRE KOMINFO	-
14	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kemsyarakatan	5	WIRE KOMINFO	-
15	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan	5	WIRE KOMINFO	-
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	80		FIBER OPTIC
17	Bidang Sandi dan Telekomunikasi (SANTEL)	5	WIRE KOMINFO	-
18	Dinas Pendidikan	10	WIRE KOMINFO	-
19	Dinas Ketahanan Pangan	5	WIRE KOMINFO	-
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10		FIBER OPTIC
21	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	10		FIBER OPTIC
22	Dinas Perindustrian	5		FIBER OPTIC
23	Dinas Kesehatan	10	WIRE KOMINFO	-
24	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Gd. A	5	WIRE KOMINFO	-
25	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Gd. B	5	WIRE KOMINFO	-
26	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Pengendalian Pendidikan dan Keluarga Berencana	10	WIRE KOMINFO	-
27	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	10	WIRE KOMINFO	-
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5	WIRE KOMINFO	-
29	Dinas Kebudayaan (Museum Daerah)	5	WIRE KOMINFO	-
30	Dinas Pariwisata	5	WIRE KOMINFO	-
31	Dinas Sosial	10	WIRE KOMINFO	-
32	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Gedung Arsip)	5	WIRE KOMINFO	-
33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Perpustakaan Wilayah)	10	WIRE KOMINFO	-
34	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5	WIRE KOMINFO	-
35	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan	10	WIRE KOMINFO	-
36	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10	WIRE KOMINFO	-

37	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	10	WIRE KOMINFO	-
38	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	WIRE KOMINFO	-
39	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	10	WIRE KOMINFO	-
40	Dinas PU dan PR	5	WIRE KOMINFO	-
41	Dinas Perhubungan	5	WIRE KOMINFO	-
42	Dinas Kelautan dan Perikanan	5	WIRE KOMINFO	
43	Badan Ketahanan Pangan	5	WIRE KOMINFO	
44	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	10	WIRE KOMINFO	
45	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	5		<b>FIBER OPTIC</b>
46	Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)	5	WIRE KOMINFO	
47	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	10	WIRE KOMINFO	
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)	5	WIRE KOMINFO	
49	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	10	WIRE KOMINFO	
50	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10	WIRE KOMINFO	
51	Kantor Inspektorat	10	WIRE KOMINFO	
52	RSUD Arifin Achmad	10	WIRE KOMINFO	
53	RS Petala Bumi	5	WIRE KOMINFO	
54	Sekretariat DPRD	10	WIRE KOMINFO	
55	Kantor Satpol PP	10	WIRE KOMINFO	
56	RSJ Tampan	10	WIRE KOMINFO	
57	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)	5	WIRE KOMINFO	
58	Komisi Informasi Provinsi Riau (KIP)	5	WIRE KOMINFO	
59	Gedung Daerah/Kediaman Gubernur	20	WIRE KOMINFO	
60	Gedung Dharma Wanita	5	WIRE KOMINFO	

**2) Jumlah OPD yang menerapkan e-government secara terintegrasi, aman dan handal**

**Target : 35 OPD**

**Realisasi : 46 OPD**

Dalam hal ini kriteria OPD yang telah menerapkan e-government adalah OPD yang telah menjalankan aplikasi e-office melalui alamat website resmi (subdomain.riau.go.id) dan email riau.go.id, berikut beberapa OPD tersebut :

DISKOMINFO RIAU

### DAFTAR NAMA OPD YANG MENGGUNAKAN E-OFFICE

No.	Nama OPD/SKPD	Singkatan Nama OPD	alamat website resmi (subdomain.riau.go.id)	email riau.go.id	List Aplikasi	Implementasi e-Office
1	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Biro Ekonomi	bap.riau.go.id	biroekonomi@riau.go.id	agenda.riau.go.id/biroekonomi, simperkom.bap.riau.go.id, bumd.bap.riau.go.id	Belum Menggunakan
2	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Biro Kesra	birokesra.riau.go.id	birokesra@riau.go.id	agenda.riau.go.id/birokesra, bansos-hibah.riau.go.id	Belum Menggunakan
3	Biro Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa	Biro APPBJ	biropembangunan.riau.go.id		agenda.riau.go.id/biropembangunan, lpse.riau.go.id, sirup.lkpp.go.id, monev.riau.go.id, sulap.riau.go.id, monev.lkpp.go.id	Sudah Menggunakan, Namun Belum Maksimal
4	Biro Hukum Setda Riau	Biro Hukum	jdih.riau.go.id	birohukum@riau.go.id	agenda.riau.go.id/birohukum	Sudah Menggunakan, Namun Belum Maksimal
5	Biro Hubungan Masyarakat, Protokol dan Kerjasama	HPK	humas.riau.go.id	birohpk@riau.go.id	agenda.riau.go.id/hpk	Belum Menggunakan
6	Biro Organisasi Setda Riau	Biro Organisasi	biroorganisasi.riau.go.id	biroorganisasi@riau.go.id	agenda.riau.go.id/biroorganisasi	Sudah Menggunakan, Namun Belum Maksimal
7	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Pem-OTDA	tapem.riau.go.id	birootda@riau.go.id	agenda.riau.go.id/pem-otda, tapem.riau.go.id/lppd, e-cakap	Sudah Menggunakan, Namun Belum Maksimal

8	Biro Umum	Biro Umum	biroumum.riau.go.id	biroumum@riau.go.id	agenda.riau.go.id/biroumum, arsip.biroumum.riau.go.id, aplikasi agenda pamakaian ruangan setda	Sudah Menggunakan, Namun Belum Maksimal
9	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Diskominfotik	diskominfotik.riau.go.id	diskominfotik@riau.go.id	riau.go.id, agenda.riau.go.id, agenda.riau.go.id/diskominfotik, e-office.riau.go.id, jagari.riau.go.id, streaming.riau.go.id, gsb.riau.go.id, sddkd.riau.go.id, mediacenter.riau.go.id, e-absen.riau.go.id, peta.riau.go.id, eksekutif.riau.go.id, helpdesk.riau.go.id, mail.riau.go.id, drive.riau.go.id,	Sudah Maksimal Menggunakan
10	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	ESDM	esdm.riau.go.id	esdm@riau.go.id	agenda.riau.go.id/esdm, resgo.riau.go.id, aplikasi data numeric, resgo mobile	Sudah Menggunakan, Namun Belum Maksimal
11	Dinas Kebudayaan	Disbud	disbud.riau.go.id	disbud@riau.go.id	agenda.riau.go.id/disbud	Belum Menggunakan
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	DKP	dkp.riau.go.id	dkp@riau.go.id	agenda.riau.go.id/dkp, simgaji (desktop), simkada, esilopi, e-pupi, saiba/sakpa, simak BMN,	Sudah Menggunakan, Namun Belum Maksimal
13	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Dispora	dispora.riau.go.id	dispora@riau.go.id	agenda.riau.go.id/dispora, sim sarana dan prasarana olahraga (desktop)	Sudah Menggunakan, Namun Belum Maksimal
14	Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Disdukcapild aldukkb	disdukcapildaldukkb.riau.go.id	disdukcapildaldukkb@riau.go.id	agenda.riau.go.id/disdukcapildaldukkb, sim administrasi kependudukan (siak), siak konsolidasi, lancang kuning bersinar	Sudah Menggunakan, Namun Belum Maksimal

15	Dinas Kesehatan	Dinkes	dinkes.riau.go.id	dinaskesehatan@riau.go.id	agenda.riau.go.id/dinkes	Sudah Menggunakan, Namun Belum Maksimal
16	Dinas Ketahanan Pangan	Diskepang	diskepang.riau.go.id	diskepang@riau.go.id	agenda.riau.go.id/diskepang, simkp.diskepang.riau.go.id	Sudah Menggunakan, Namun Belum Maksimal
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dislhk	dislhk.riau.go.id	dislhk@riau.go.id	agenda.riau.go.id/dislhk, rpbbi.dephut.go.id, sipmbp.phpl.menlhk.go.id:80/80, sistem informasi kawasan hutan (web/lokal), silk.dephut.go.id, sipuhh.dephut.net	Sudah Menggunakan, Namun Belum Maksimal
18	Dinas Pariwisata	Dispar	pariwisata.riau.go.id	dispar@riau.go.id	agenda.riau.go.id/dispar, bilikdestinasi.pariwisata.riau.go.id, riauthehomelandofmelayu (mobile), riaucreativecenter.id	Sudah Menggunakan, Namun Belum Maksimal
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR	pupr.riau.go.id	pupr@riau.go.id	agenda.riau.go.id/pupr	Sudah Menggunakan, Namun Belum Maksimal
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	DPMD	pmd.riau.go.id	dpmd@riau.go.id	agenda.riau.go.id/dpmd	Sudah Menggunakan, Namun Belum Maksimal
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DPPPA	dpppa.riau.go.id	dpppa@riau.go.id	agenda.riau.go.id/dpppa	Sudah Menggunakan, Namun Belum Maksimal
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP	dpmptsp.riau.go.id	dpmptsp@riau.go.id	agenda.riau.go.id/dpmptsp, simpel, e-vote, sistem antrian digital, perizinan.dpmptst.riau.go.id, mobile perizinan, simpel.dpmptsp.riau.go.id, dblkpm.dpmptsp.riau.go.id, anjungan informasi ceria	Sudah Maksimal Menggunakan

23	Dinas Pendidikan	Disdik	disdik.riau.go.id	dinaspendidikan@riau.go.id	agenda.riau.go.id/disdik, kelender.disdik.riau.go.id, guruhonda.disdik.riau.go.id, dapodik.disdik.riau.go.id	Sudah Menggunakan, Namun Belum Maksimal
24	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	Disdagkopukm	disdagkopukm.riau.go.id	disdagkop_ukm@riau.go.id	agenda.riau.go.id/disdagkopukm	Sudah Menggunakan, Namun Belum Maksimal
25	Dinas Perhubungan	Dishub	dishub.riau.go.id	dinasperhubungan@riau.go.id	agenda.riau.go.id/dishub	Sudah Menggunakan, Namun Belum Maksimal
26	Dinas Perindustrian	Disperin	disperin.riau.go.id	disperin@riau.go.id	agenda.riau.go.id/disperin	Sudah Menggunakan, Namun Belum Maksimal
27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	DIPERSIP	dipersip.riau.go.id	dipersip@riau.go.id	agenda.riau.go.id/dipersip, buku tamu (desktop), senayan library management system, e-dokumentasi, kearsipan, layanan arsip statis, pustaka digital, quadra library information system, opac, people counter	Sudah Menggunakan, Namun Belum Maksimal
28	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PKPP	pkpp.riau.go.id	pkpp@riau.go.id	agenda.riau.go.id/pkpp	Sudah Menggunakan, Namun Belum Maksimal
29	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dispkh	dispkh.riau.go.id	dinaspkh@riau.go.id	agenda.riau.go.id/dispkh, isikkhnas.com, aplikasi2.pertanian.go.id, eproposal.pertanian.go.id	Sudah Menggunakan, Namun Belum Maksimal
30	Dinas Sosial	Dinsos	dinsos.riau.go.id	dinassosial@riau.go.id	agenda.riau.go.id/dinsos, aplikasi penanganan fakir miskin riau	Sudah Menggunakan, Namun Belum Maksimal

31	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan	Distanbun	distanbun.riau.go.id	distanbun@riau.go.id	agenda.riau.go.id/distanbun, sistem informasi kelompok tani bermanfaat, e-bokar.disbun.riau.go.id, web gis perkebunan, Sistem Informasi Kelompok Tani Bermanfaat, Info Harga Tbs (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit, Info Harga Sayuran, Info Harga Buah, Info Harga Palawija	Sudah Menggunakan, Namun Belum Maksimal
32	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Disnakertrans	disnakertrans.riau.go.id	disnakertrans@riau.go.id	agenda.riau.go.id/disnakertrans	Sudah Menggunakan, Namun Belum Maksimal
33	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	BPSDM	bpsdm.riau.go.id	bpsdm@riau.go.id	agenda.riau.go.id/bpsdm, sistem informasi manajemen diklat, Aplikasi Sida Lanri	Sudah Menggunakan, Namun Belum Maksimal
34	Badan Kepegawaian Daerah	BKD	bkd.riau.go.id	bkd@riau.go.id	agenda.riau.go.id/bkd, skpd.asn.riau.go.id, skp.asn.riau.go.id, asn.riau.go.id	Sudah Menggunakan, Namun Belum Maksimal
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kesbangpol	kesbangpol.riau.go.id	kesbangpol@riau.go.id	agenda.riau.go.id/kesbangpol, sistem informasi database ormas (desktop), kesbangpol.kemendagri.go.id/sipks/rencana_aksi, simda BMD (desktop)	Sudah Menggunakan, Namun Belum Maksimal
36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD	bpbd.riau.go.id	bpbd@riau.go.id	agenda.riau.go.id/bpbd	Sudah Menggunakan, Namun Belum Maksimal
37	Badan Pendapatan Daerah	Bapenda	badanpendapatan.riau.go.id	bapenda@riau.go.id	agenda.riau.go.id/bapenda, badanpendapatan.riau.go.id/infopajak, badanpendapatan.riau.go.id/realtime_display/, aplikasi NJKB (desktop)	Sudah Menggunakan, Namun Belum Maksimal

38	Badan Penelitian dan Pengembangan	Balitbang	balitbang.riau.go.id	balitbang@riau.go.id	agenda.riau.go.id/balitbang	Sudah Menggunakan, Namun Belum Maksimal
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	BPKAD	bpkad.riau.go.id	bpkad@riau.go.id	agenda.riau.go.id/bpkad	Sudah Menggunakan, Namun Belum Maksimal
40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda	bappeda.riau.go.id	bappeda@riau.go.id	agenda.riau.go.id/bappeda	Sudah Menggunakan, Namun Belum Maksimal
41	Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru	RSJ Tampan	rsjiwatampan.riau.go.id	rsjtampan@riau.go.id	agenda.riau.go.id/rsjtampan	Sudah Menggunakan, Namun Belum Maksimal
42	Inspektorat Daerah Provinsi Riau	Inspektorat	inspektorat.riau.go.id	inspektorat@riau.go.id	agenda.riau.go.id/inspektorat, eauditee.bpk.go.id, SIPTL, SIMHP	Sudah Menggunakan, Namun Belum Maksimal
43	Rumah Sakit Petala Bumi	RSPB	rsudpetalabumi.riau.go.id	rsudpetalabumi@riau.go.id	agenda.riau.go.id/rspb, SIMRS GOS	Sudah Menggunakan, Namun Belum Maksimal
44	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	RSUDAA	rsudarifinachmad.riau.go.id	rsudarifinachmad@riau.go.id	agenda.riau.go.id/rsudaa	Sudah Menggunakan, Namun Belum Maksimal
45	Satuan Polisi Pamong Praja	Satpol PP	satpolpp.riau.go.id	satpolpp@riau.go.id	agenda.riau.go.id/satpolpp	Sudah Menggunakan, Namun Belum Maksimal
46	Sekretaris DPRD Provinsi Riau	Setwan	dprd.riau.go.id	setwan@riau.go.id	agenda.riau.go.id/setwan, sistem informasi pegawai untuk monitoring pegawai	Sudah Menggunakan, Namun Belum Maksimal

Berikut 4 OPD yang belum menggunakan aplikasi e-office sama sekali :

1. Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda Provinsi Riau
2. Biro Hubungan Masyarakat Setda Provinsi Riau
3. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Riau
4. Dinas Kebudayaan

Alasan belum digunakannya e-office pada 4 OPD ini adalah karena kurangnya tenaga IT yang bisa mengoperasikan e-office pada OPD tersebut, dan dari 80 tenaga ahli IT yang direkrut tidak mencukupi untuk seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Namun mulai tahun 2017 di setiap OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau masing-masing akan ditempatkan tenaga ahli IT seiring dengan banyaknya OPD yang bergabung (menyusutnya jumlah OPD) sehingga kebutuhan tenaga IT menjadi tercukupi.



Dengan meningkatnya keterbukaan informasi publik di Provinsi Riau, diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut, indikator kinerjanya yang kedua adalah **Nilai Keterbukaan Informasi Provinsi Riau**.

Gambaran capaian sasaran **Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Riau** adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai Keterbukaan Informasi Provinsi Riau	44,5	0,00	..... %

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2017 dilakukan guna mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi di Badan Publik sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) yang kemudian secara teknis telah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik. Kegiatan ini dilaksanakan selama 7 (tujuh) bulan yang berlangsung pada Juni-Desember 2017 yang diakhiri dengan Pemeringkatan Badan Publik. Badan Publik **WAJIB** mengikuti seluruh alur kegiatan yang telah ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat.

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2017 dalam penilaiannya menggunakan 4 indikator, yaitu:

1. Mengumumkan Informasi Publik
2. Menyediakan Informasi Publik
3. Pelayanan Permohonan Informasi Publik
4. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

#### **ALUR KEGIATAN**

##### **A. Pengiriman SAQ (Self Assessment Questionnaire)**

1. Tim Penilai KIP akan mengirimkan SAQ dalam bentuk softfile melalui email dan/atau SAQ dalam bentuk hardfile melalui alamat Badan Publik dan dapat diunduh pada situs Komisi Informasi Pusat ([www.komisiinformasi.go.id](http://www.komisiinformasi.go.id)). Pengiriman SAQ kepada 400 Badan Publik yang dilakukan pada bulan Juni 2017 dan terbagi atas 7 kategori dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kementerian
- b. Pemerintah Provinsi
- c. Perguruan Tinggi Negeri
- d. Lembaga Negara & Lembaga Pemerintah Non Kementerian
- e. Lembaga Non Struktural
- f. Badan Usaha Milik Negara
- g. Partai Politik

2. Pengembalian SAQ dari Badan Publik kepada Tim Penilai KIP dalam bentuk softfile (CD/Flashdisk) disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Email ke [monev2017@komisiinformasi.go.id](mailto:monev2017@komisiinformasi.go.id) dengan subyek email (Monev2017\_BadanPublik, contoh: Monev2017\_Komisi Informasi Pusat).
- b. Antar Langsung ke Kantor Komisi Informasi Pusat Gedung Graha PPI lantai 5, Jalan Abdul Muis Nomor 8, Jakarta Pusat. Telp: 021 - 38430741, Faks : 021 34830757.
- c. Jasa Kiriman.

B. Verifikasi SAQ (Self Assessment Questionnaire)

1. SAQ yang telah diisi dan dikembalikan oleh Badan Publik akan menghasilkan nilai pertama.
2. SAQ tersebut akan diverifikasi oleh Tim Penilai KIP untuk menghasilkan nilai kedua. Verifikasi dilakukan melalui:
  - a. Situs/portal yang tercantum dalam kolom “Keterangan Data Dukung” SAQ
  - b. Data dukung yang dikirimkan bersamaan dengan SAQ

C. Verifikasi Lanjutan Acak (VLA) Setelah dilakukan verifikasi SAQ maka akan dilanjutkan ke tahap VLA oleh Tim Penilai KIP dengan cara melakukan verifikasi mendalam dengan meminta data dukung atas pertanyaan tertentu dalam SAQ kepada Badan Publik dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Tim Penilai KIP. Pertanyaan dikirimkan melalui email (tertulis) kepada responden Badan Publik yang mengisi SAQ. VLA akan dilaksanakan pada bulan Juli 2017. Hasil VLA menjadi nilai ketiga bagi Badan Publik.

Nilai dari kegiatan A, B, dan C adalah tahapan Term I yang menjadi bahan Pra Evaluasi untuk diberikan oleh Tim Penilai KIP kepada Badan Publik.

Alur kegiatan A, B, dan C dilakukan kembali pada Term II setelah mendapat Pra Evaluasi dari Tim Penilai KIP dengan ketentuan:

- Badan Publik kembali mengisi dan mengirimkan SAQ dengan menggunakan lembar SAQ yang sama pada Term I.

- Pengisian SAQ dilakukan dengan memperhatikan tolok ukur hasil Pra Evaluasi Term I.
- Alur kegiatan B (Verifikasi SAQ) akan menghasilkan 20 Badan Publik pada setiap kategori dengan nilai tertinggi untuk masuk pada alur kegiatan C (Verifikasi Lanjutan Acak).
- Alur kegiatan C (Verifikasi Lanjutan Acak) akan menghasilkan 10-15 Badan Publik pada setiap kategori dengan nilai tertinggi untuk masuk pada alur kegiatan D (Visitasi).

Hasil Pra Evaluasi merupakan tolok ukur awal bagi Badan Publik untuk dapat ditingkatkan pada Term II. Hasil pemeringkatan akan ditentukan berdasarkan nilai pada Term II.

#### D. Visitasi

Visitasi merupakan tahap akhir untuk menghasilkan peringkat 10 Badan Publik pada setiap kategori. Visitasi dilakukan untuk mengukur 5 KO (Komitmen, Koordinasi, Komunikasi, Kolaborasi, Konsisten) Keterbukaan Informasi Publik yang disampaikan oleh Badan Publik melalui presentasi.

#### **PENEKANAN PENILAIAN**

Dengan memperhatikan telah diberlakukannya UU KIP selama 6 tahun, maka untuk tahun ini indikator Keterbukaan Informasi pada Badan Publik lebih ditekankan pada Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik sebagai jaminan hak masyarakat atas Informasi Publik.

#### **PRESENTASE BOBOT NILAI**

##### **A. Untuk bobot nilai pada setiap alur kegiatan, sebagai berikut :**

- 1) Verifikasi SAQ, berbobot 30%
- 2) Verifikasi Lanjutan Acak, berbobot 30%
- 3) Visitasi, berbobot 40%

##### **B. Untuk bobot nilai pada masing-masing indikator dalam SAQ, sebagai berikut :**

- 1) Mengumumkan Informasi Publik berbobot 25%

- 2) Menyediakan Informasi Publik berbobot 20%
- 3) Pelayanan Informasi publik berbobot 25%
- 4) Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik berbobot 30%

#### **C. Panduan Umum Pengisian SAQ KPMKIP**

1. Pengisi Kuesioner/Responden adalah Pejabat Pengelola dan Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau petugas yang ditunjuk oleh Pejabat yang memiliki kewenangan di Bidang Informasi, Komunikasi dan/atau Kehumasan Badan Publik.
2. Berikan tanda "X" (silang) pada kolom "Jawaban" yang tersedia dengan memperhatikan kolom "Indikator Lengkap" berdasarkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Saudara secara obyektif.
3. Setiap jawaban Saudara harus menyebutkan alamat situs/portal dan/atau melampirkan *softfile* sebagai data dukung ketersediaan informasi pada kolom "Keterangan Data Dukung". Apabila tidak menyebutkan dan/atau melampirkan, maka Tim Penilai KIP tidak akan menilai.
4. Lampiran *softfile* dapat dengan format Jpeg atau Pdf, yang dikirimkan melalui *email* atau dikemas dalam media cakram (CD/DVD) dan dikirim bersamaan dengan pengembalian kuesioner.
5. Kuesioner ini dapat diunduh di [www.komisiinformasi.go.id](http://www.komisiinformasi.go.id)

#### **D. Batas Waktu dan Tata Cara Penerimaan Kuesioner oleh Tim Penilai KIP**

1. Batas waktu penerimaan SAQ yang telah diisi:
2. Term I
3. Melalui *email*, **tanggal 10 Juli 2017 Pukul 23.59 WIB**
4. Antar Langsung ke Kantor Komisi Informasi Pusat, **tanggal 10 Juli 2017 Pukul 16.00 WIB**
5. Jasa Kiriman, **tanggal 10 Juli 2017 (Cap Kirim).**
6. Term II
7. Melalui *email*, **tanggal 15 September 2017 Pukul 23.59 WIB**
8. Antar Langsung ke Kantor Komisi Informasi Pusat, **tanggal 15 September 2017 Pukul 16.00 WIB**
9. Jasa Kiriman, **tanggal 15 September 2017 (Cap Kirim).**

#### **KUALIFIKASI PENILAIAN**

Hasil akhir dari pemeringkatan keterbukaan informasi Badan Publik berupa kualifikasi yang terdiri atas :

- a. Informatif (I) dengan nilai 97 – 100;
- b. Menuju Informatif (MI) dengan nilai 80 – 96;
- c. Cukup Informatif (CI) dengan nilai 60 – 79;
- d. Kurang Informatif dengan nilai 40 – 59; dan
- e. Tidak Informatif dengan nilai <39.

**PENGUKURAN NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PROVINSI RIAU TAHUN 2016 :**

- **Tahap Pengiriman/Pengisian Kuesioner**

Kuesioner yang telah diisi oleh Dinas Kominfo Provinsi Riau terdapat pada lampiran-5.

Kuesioner yang telah diisi telah dikirimkan kembali ke Komisi Informasi Pusat melalui email.

- **Tahap Verifikasi Situs/Portal dan Softfile Data Dukung**

Kuesioner yang telah diterima oleh KI Pusat, dinilai dengan memverifikasi kuesioner tersebut melalui media situs/portal dan soft file data dukung yang telah dilampirkan oleh Dinas Kominfo Provinsi Riau. Sampai pada tahap ini Dinas Kominfo mendapat nilai 35,1.

- **Tahap Verifikasi Lanjutan Acak (VLA)**

Karena kurangnya koordinasi antara Dinas Kominfo Provinsi Riau dan KI Pusat, Provinsi Riau gagal mengikuti tahap Verifikasi Lanjutan Acak (VLA).

- **Tahap Visitasi Badan Publik**

Pada tahap visitasi Dinas Kominfotik Provinsi Riau mendapatkan nilai 59.

Hasil penilaian :

TAHAPAN	BOBOT	NILAI	JUMLAH
Self Assessment Questioner (SAQ) dan Verifikasi Website serta Softfile Data Dukung	30%	35,1	10,53
Verifikasi Lanjutan Acak (VLA)	30%	0	0
Visitasi Badan Publik	40%	59	23,6
<b>TOTAL (NILAI AKHIR)</b>			<b>34,13</b>
<b>KATEGORI : TIDAK INFORMATIF</b>			

Hasil Pemeringkatan Kategori Badan Publik Provinsi tahun 2015 secara keseluruhan (10 besar) :

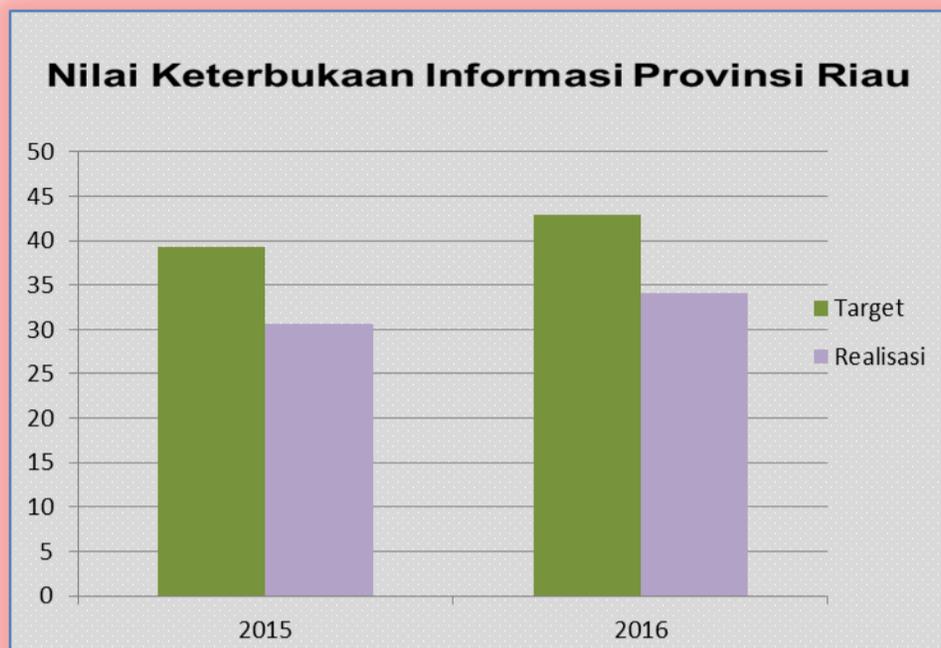
Peringkat	Provinsi	Nilai Keterbukaan Informasi	Kategori
I	Jawa Timur	94,24	Menuju Informatif
II	Aceh	90,24	Menuju Informatif
III	Kalimantan Timur	88,17	Menuju Informatif
IV	Banten	88,08	Menuju Informatif
V	Sumatera Selatan	87,34	Menuju Informatif
VI	DKI Jakarta	86,73	Menuju Informatif
VII	Kalimantan Barat	84,77	Menuju Informatif
VIII	Jawa Tengah	84,00	Menuju Informatif
IX	Nusa Tenggara Barat	73,54	Cukup Informatif
X	Sumatera Barat	73,05	Cukup Informatif

**PERBANDINGAN NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PROVINSI RIAU TAHUN 2016**

**DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (2015)**

Mulai tahun 2016 Komisi Informasi Pusat telah membakukan tata cara penilaian keterbukaan informasi Badan Publik melalui Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi badan Publik, sehingga perbandingan nilai tahun berjalan dengan nilai tahun sebelumnya dapat disandingkan. Berikut perbandingan nilai keterbukaan informasi Provinsi Riau Tahun 2016 dengan tahun 2015 :

NILAI KETERBUKAAN INFORMASI	2015	2016
Target	39,360	42,91
Realisasi	30,569	34,13
Capaian	77,67%	79,54%



Dilihat dari nilai keterbukaan informasi Provinsi Riau tahun 2015 dan 2016 masih dibawah angka 39 yaitu masih klasifikasi **TIDAK INFORMATIF**. Namun secara angka, nilai keterbukaan informasi tahun 2016 mengalami peningkatan 3,561 poin dari tahun 2015.

Berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan nilai keterbukaan Provinsi Riau tahun berikutnya :

- ✓ Adanya komitmen dari bidang terkait untuk mengikuti pemeringkatan (melakukan persiapan yang matang, kalau perlu dibentuk tim khusus untuk mempersiapkan bahan-bahan yang akan menjadi dasar penilaian)
- ✓ Memperhatikan lagi surat-surat perjanjian dengan pihak ke-3, DIP (Daftar Informasi Publik) serta ketersediaan dokumen pendukung dari peraturan perundang-undangan, keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Riau dan perlu diperhatikan lagi untuk laporan keuangan yang sudah diaudit karena ini semua adalah informasi yang harus disediakan oleh Badan Publik (Saran dari Komisi Informasi Pusat)

**SUB INDIKATOR NILAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK :**

NO.	SUB INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	Persentase keterisian data pembangunan Provinsi Riau pada SDDKD	OPD	26,19%	27,77	106%
2.	Jumlah Pengunjung website	Orang	280.000	575.372	205%

	resmi dan media online yang dikelola Diskominfo Provinsi Riau				
3.	Jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan internet yang dikelola Diskominfo Provinsi Riau	Orang	35.000	13.317	38%

Rincian selengkapnya untuk setiap sub indikator adalah sebagai berikut :

1) **Persentase keterisian data pembangunan Provinsi Riau pada SDDKD**

**Target : 26,19%**

Jumlah data/tahun yang wajib diisi di SDDKD = 1.318 x 12 kab/kota = 15.816 data.

Jumlah data yang wajib diisi dari tahun 2003 s/d 2017 (15 tahun), seharusnya =

15.186 x 15th = 237.240 data

Target jumlah data sampai tahun 2017 = 60.000 data

**Persentase target keterisian data sampai tahun 2017 = 60.000 data**

**(60.000/237.240)\*100% = 25.29%**

**Realisasi : 25,31%**

Realisasi jumlah keterisian data sampai tahun 2016 = **60.056** data

**Persentase realisasi keterisian data sampai tahun 2017 =**

**(60.056/237.240)\*100% = 25,31%**

Namun angka realisasi ini bukanlah angka akhir, ini disebabkan proses updating data tahun n masih akan berlanjut sampai n+3, artinya data final tahun 2017 baru akan didapat pada akhir tahun 2019.

No.	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH DATA
1	PROVINSI RIAU	7155
2	PEKANBARU	2353
3	DUMAI	2988
4	ROKAN HULU	4175
5	INDRAGIRI HULU	2416
6	INDRAGIRI HILIR	2959
7	KUANTAN SINGINGI	5104
8	KAMPAR	3345
9	PELALAWAN	3074
10	SIAK	3138

11	BENGKALIS	3857
12	KEPULAUAN MERANTI	3451
13	ROKAN HILIR	1305
	DATA PENDUKUNG	14736
<b>TOTAL</b>		<b>60059</b>

2) Jumlah Pengunjung website resmi dan media online yang dikelola Diskominfo

Provinsi Riau

Target : 280.000 orang

Realisasi : 154.743 orang

Jumlah tersebut berasal dari 3 website yang dikelola Dinas Kominfo Provinsi Riau yaitu :

- [www.riau.go.id](http://www.riau.go.id) : 2.508
- [www.diskominfo.riau.go.id](http://www.diskominfo.riau.go.id) : 12.347
- [www.mediacenter.riau.go.id](http://www.mediacenter.riau.go.id) : 139.888 +  
154.743 orang

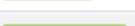
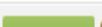
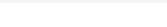
\*) [www.riau.go.id](http://www.riau.go.id) merupakan website resmi Pemerintah Provinsi Riau yang dikelola Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau .

\*) [www.diskominfo.riau.go.id](http://www.diskominfo.riau.go.id) merupakan website resmi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau yang dikelola Dinas Kominfo Provinsi Riau

\*) [www.mediacenter.riau.go.id](http://www.mediacenter.riau.go.id) merupakan website resmi media center Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau yang dikelola Dinas Kominfo Provinsi Riau

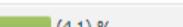
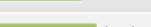
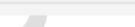
## REKAPITULASI PENGUNJUNG WEBSITE TAHUN 2017

[www.riau.go.id](http://www.riau.go.id)

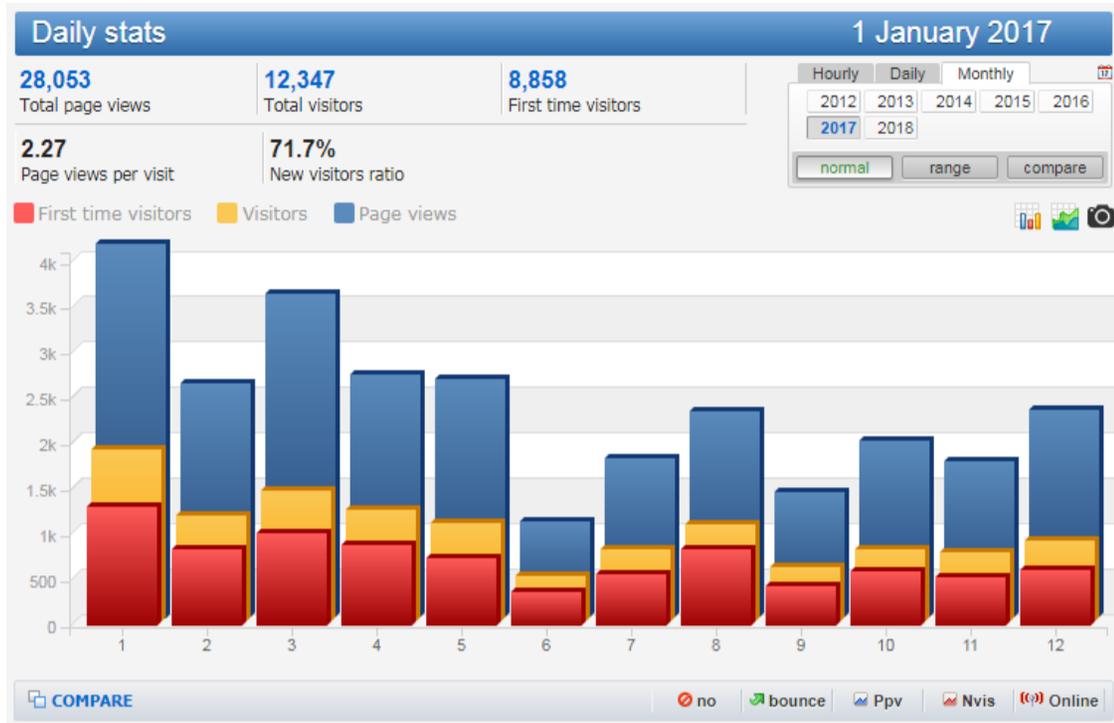
Time	Visitors Graph	Visitors	Pages (Ppv )	newvis(%)	%Bounce
January 2017	 (15.4) %	1,906	4,131 (0.69)	1,318 (69 %)	64.3 %
February 2017	 (9.5) %	1,181	2,590 (0.71)	847 (71 %)	63.5 %
March 2017	 (11.7) %	1,448	3,577 (0.7)	1,026 (70 %)	59.3 %
April 2017	 (9.9) %	1,233	2,687 (0.72)	893 (72 %)	64.8 %
May 2017	 (8.8) %	1,095	2,630 (0.68)	752 (68 %)	61.8 %
June 2017	 (4.1) %	515	1,057 (0.74)	386 (74 %)	64.4 %
July 2017	 (6.4) %	794	1,753 (0.73)	580 (73 %)	62.7 %
August 2017	 (8.7) %	1,083	2,279 (0.78)	846 (78 %)	65 %
September 2017	 (4.8) %	602	1,385 (0.73)	441 (73 %)	58.9 %
October 2017	 (6.5) %	809	1,950 (0.75)	608 (75 %)	62.4 %
November 2017	 (6.2) %	776	1,722 (0.69)	540 (69 %)	64.1 %
December 2017	 (7.3) %	905	2,292 (0.68)	621 (68 %)	57.4 %

Total Visitor : **Merupakan Total Jumlah Pengunjung Website**

Total Page Views : **Jumlah Total halaman Berita yang di Buka**

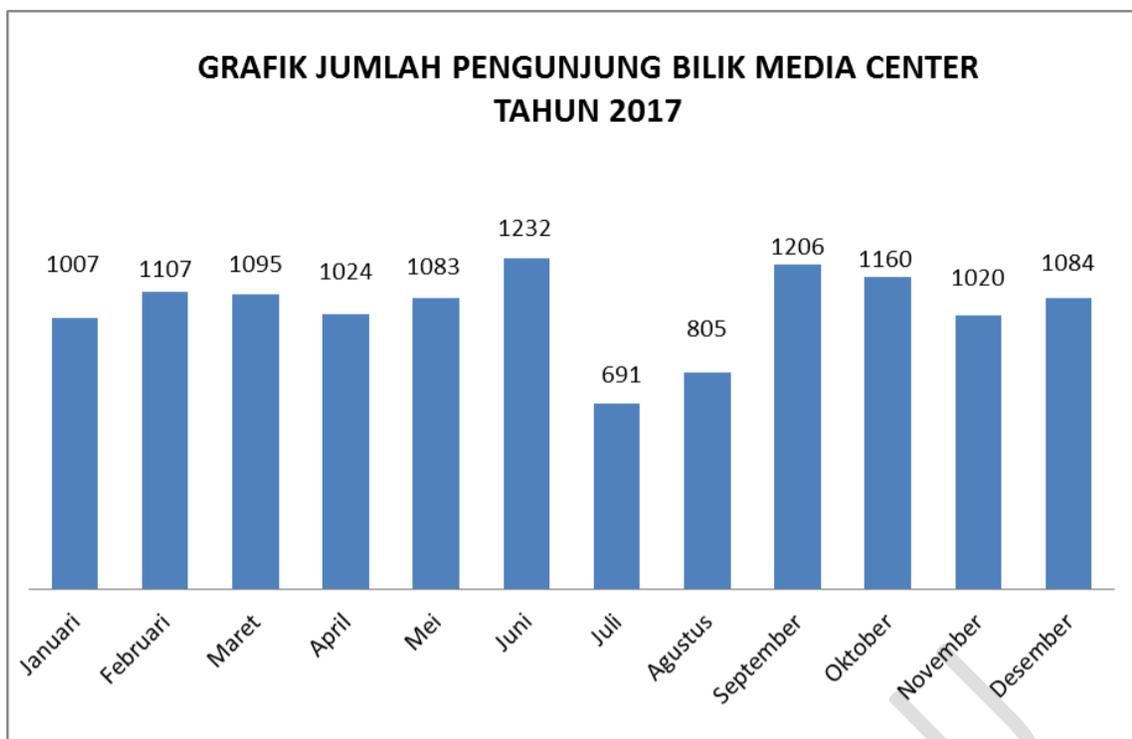
Time	Visitors Graph	Visitors	Pages (Ppv )	newvis(%)	%Bounce
January 2017	 (15.4) %	1,906	4,131 (0.69)	1,318 (69 %)	64.3 %
February 2017	 (9.5) %	1,181	2,590 (0.71)	847 (71 %)	63.5 %
March 2017	 (11.7) %	1,448	3,577 (0.7)	1,026 (70 %)	59.3 %
April 2017	 (9.9) %	1,233	2,687 (0.72)	893 (72 %)	64.8 %
May 2017	 (8.8) %	1,095	2,630 (0.68)	752 (68 %)	61.8 %
June 2017	 (4.1) %	515	1,057 (0.74)	386 (74 %)	64.4 %
July 2017	 (6.4) %	794	1,753 (0.73)	580 (73 %)	62.7 %
August 2017	 (8.7) %	1,083	2,279 (0.78)	846 (78 %)	65 %
September 2017	 (4.8) %	602	1,385 (0.73)	441 (73 %)	58.9 %
October 2017	 (6.5) %	809	1,950 (0.75)	608 (75 %)	62.4 %
November 2017	 (6.2) %	776	1,722 (0.69)	540 (69 %)	64.1 %
December 2017	 (7.3) %	905	2,292 (0.68)	621 (68 %)	57.4 %

Total Visitor : Merupakan Total Jumlah Pengunjung Website  
 Total Page Views : Jumlah Total halaman Berita yang di Buka



**REKAPITULASI PENGUNJUNG BILIK MEDIA CENTER SOEMAN HS  
 DAN DISKOMINFOTIK LT.I TAHUN 2017**  
<http://mediacenter.riau.go.id>

No	Bulan	Jumlah Pengunjung ( orang )
1	Januari	1007
2	Februari	1107
3	Maret	1095
4	April	1024
5	Mei	1083
6	Juni	1232
7	Juli	691
8	Agustus	805
9	September	1206
10	Oktober	1160
11	Nopember	1020
12	Desember	1084
<b>Total</b>		<b>12514</b>



**3) Jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan internet yang dikelola Diskominfo Provinsi Riau**

**Target : 35.000 orang**

**Realisasi : 154.743 orang**

Capaian realisasi jumlah pengunjung bilik media center hanya 38% dari target, ini disebabkan karena adanya perpindahan lokasi bilik media center di Lantai 1 Biro Humas dan juga sering putusnya jaringan internet di bilik media center Puswil Soeman HS.

## PENGUKURAN KINERJA

OPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU

Tahun Anggaran : 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	<b>Nilai e-government Provinsi Riau</b>  Sub indikator :  - Jumlah jaringan komunikasi dan informatika yang terhubung pada SKPD Pemprov Riau  - Jumlah SKPD yang menerapkan e-government secara terintegrasi, aman dan handal	<b>2,6</b>    51 jaringan   35 OPD	<b>0</b>  <b>(Tidak ada pemeringkatan)</b>   60 jaringan   43 OPD	<b>0 %</b>    100%   122,8%
	<b>Nilai Keterbukaan Informasi Provinsi Riau</b>  Sub indikator :  - Persentase keterisian data pembangunan Provinsi Riau pada SDDKD  - Jumlah Pengunjung website resmi dan media online yang dikelola Diskominfo Provinsi Riau  - Jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan internet yang dikelola Diskominfo Provinsi Riau	<b>42,91</b>   25,29%  280.000 orang  35.000 orang	<b>34,13</b>   25,31%  575.372 Orang  13.317 orang	<b>79,54%</b>   106%  205%  38%

## B. REALISASI ANGGARAN

Struktur keuangan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau berdasarkan klasifikasi belanja menurut urusan, OPD yang melaksanakan Urusan Wajib Komunikasi Informatika. Lebih lanjut pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2017 yang disahkan, dapat diwujudkan dengan tersedianya anggaran sebagaimana tertuang dalam APBD, baik yang dialokasikan pada anggaran Belanja Langsung maupun anggaran Belanja Tidak Langsung.

Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau yang dialokasikan pada APBD Provinsi Riau Tahun 2017 setelah perubahan seluruhnya berjumlah Rp. 14.222.387.500,- (empat belas milyar dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi keuangan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung sebesar Rp. 22.616.708.585,- (dua puluh dua milyar enam ratus enam belas juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah), uraian ringkas serta realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

### Realisasi penyerapan APBD Dinas Kominfo Provinsi Riau Tahun 2017 (belum fix dr icut)

KODE REK.	URAIAN	JUMLAH DANA (RP.)	REALISASI	
			KEUANGAN (RP.)	FISIK (%)
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	14.222.387.500,-	10.390.716.034,-	73,12
5.2	BELANJA LANGSUNG	22.616.708.585,-	19.579.756.361,-	80,91
	<b>JUMLAH</b>	<b>36.839.096.085,-</b>	<b>29.970.472.395,-</b>	<b>77,02</b>

Realisasi Fisik Belanja Tidak Langsung sebesar 73,12 % dan Belanja Langsung sebesar 80,91 %.

Sedangkan realisasi keuangan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 10.390.716.034,- (sepuluh milyar tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam belas ribu tiga puluh empat rupiah) atau 73,12%. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3.831.671.466,- (tiga milyar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus enam puluh enam rupiah). Hal ini disebabkan sisa kelebihan penganggaran (accress).

Realisasi Keuangan Belanja Langsung sebesar Rp. 19.579.756.361,- (sembilan belas milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah), sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.3.036.952.224,- (tiga milyar tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh empat rupiah). Sisa anggaran tersebut pada umumnya merupakan sisa pagu pelelangan untuk pekerjaan pengadaan barang dan jasa pada beberapa kegiatan dan sisa perjalanan dinas luar daerah. Namun demikian secara keseluruhan kegiatan terlaksana dengan baik.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kominfotik Provinsi Riau tahun 2017 dapat dilihat pada lampiran-7

Secara keseluruhan dalam rangka pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun pertama berdirinya, dapat dikatakan bahwa Dinas Kominfotik Provinsi Riau sudah menunjukkan kemajuan dalam menyelenggarakan bidang Komunikasi dan Informatika. Namun masih belum bisa dikatakan berhasil, karena keberhasilan tersebut dinilai dari indikator-indikator kinerja yang harusnya dipelajari dengan cermat dan dijadikan tolak ukur penilaian keberhasilan/kegagalan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.

Terhadap pencapaian target dari berbagai indikator yang telah dicapai Dinas Kominfotik Provinsi Riau langkah ke depan yang perlu dilakukan adalah:

1. Komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau untuk meningkatkan nilai e-government Provinsi Riau dan nilai keterbukaan informasi publik Provinsi Riau.
2. Perlunya ketegasan dari pimpinan terhadap Bidang/UPT yang memang bertanggung-jawab pada Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar nilai Dinas komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau meningkat dari tahun sebelumnya.
3. Untuk nilai keterbukaan informasi publik, dapat merujuk pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi badan Publik.
4. Selama ini untuk Penilaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau menggunakan penilaian yang dilakukan pihak lain, sehingga menyulitkan dalam melakukan penilaian kinerja setiap tahunnya. Ke depannya Dinas Kominfotik agar membangun sendiri indikator kinerja.

Berikut beberapa keuntungan jika penilaian dikoordinir sendiri oleh Diskominfotik Provinsi Riau :

- Dinas Kominfotik dapat menunjuk rekanan (pihak ke 3) yang memang profesional dalam penilaian, selain itu untuk menjaga independensi penilaian agar tidak diintervensi oleh pihak internal OPD.
- Indikator dapat diukur secara berkala, misal per bulan, triwulan atau pun semester. Karena selama ini, nilai yang didapat dari instansi lain baru diperoleh di akhir tahun anggaran sehingga sulit mengukur kinerja OPD untuk semester, triwulan apalagi bulanan.
- Dinas Kominfotik bisa menjelaskan secara rinci step by step penilaian termasuk rumus-rumus yang digunakan dalam perhitungan, sebab jika nilai yang diperoleh dari pihak luar hanya menyajikan nilai akhir, kalau pun ada hanya nilai per tahapan dan nilai akhir saja. Tidak dijelaskan secara rinci rumus dan pengolahan data yang digunakan karena hal tersebut merupakan rahasia dan tidak bisa dibagikan ke pihak lain. Dan secara etika, Dinas Kominfotik sebagai OPD yang dinilai juga tidak bisa memaksa tim Penilai untuk memberi data yang dimaksud. Padahal hal tersebut perlu disajikan di buku Laporan Kinerja Dinas Kominfotik agar nilai akuntabilitas Diskominfotik menjadi lebih baik lagi.

Demikian hasil laporan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2017. Yang mana sebenarnya Dinas Kominfotik Provinsi Riau sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kelemahannya adalah karena indikator pengukur kinerja masih diukur oleh instansi lain, sehingga peningkatan kinerja tersebut tidak tampak. Oleh sebab itu kami sebagai tim Penyusun Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, mengharapkan kepada Bapak Kepala Dinas segera membentuk Tim Khusus untuk membangun indikator pengukur kinerja Dinas Kominfotik Provinsi Riau.